



**Judul** : Tajuk Rencana : Kebocoran Data Menjadi Biasa  
**Tanggal** : Rabu, 14 Juni 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 6

## T A J U K R E N C A N A

### Kebocoran Data Menjadi Biasa



abar kasus kebocoran data dari perusahaan dan organisasi kerap muncul di media. Akan tetapi, publik jarang mendapat kabar kelanjutan dan penanganannya.

Fenomena ini dipertanyakan di tengah penggunaan teknologi digital yang masif. Dewan Perwakilan Rakyat pun mendesak pemerintah agar menindaklanjuti secara tuntas dugaan kebocoran data pribadi sampai ke ranah hukum. Penyebabnya, peristiwa dugaan kebocoran data dinilai tidak ada kejelasan penanganan dan penegakan hukumnya. Akibatnya, masyarakat tak mengetahui apakah data pribadi mereka masih aman terlindungi atau tidak.

Panitia Kerja Kebocoran Data Pribadi Komisi I DPR mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Sandi dan Siber Negara untuk berkoordinasi guna tercipta sinergi dalam dua hal. Keduanya ialah melakukan langkah-langkah strategis pengamanan data sesuai tugas dan fungsi agar kedaulatan siber terjaga dengan baik serta menindaklanjuti secara tuntas kasus kebocoran data ke ranah hukum sehingga sanksi hukum yang tegas diberikan kepada pelaku (*Kompas*, 13/6/2023).

Desakan DPR sangatlah wajar. Publik terus dibingungkan dengan berbagai kasus kebocoran data. Otoritas masih cenderung bertahan dibandingkan pelaku atau setidaknya yang mengaku sebagai pelaku yang terus membuat berbagai klaim tentang serangan siber yang berakibat kebocoran data. Pelaku sesungguhnya tidak pernah diketahui.

Beberapa kalangan menilai, pihak yang melakukan klaim bukan pelaku sesungguhnya. Mereka sekadar ingin tenar. Siapa pun mereka harus tetap ditangani karena sangat meresahkan dan mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga yang menyimpan data masyarakat. Masyarakat pun merasa tak aman. Kemudian muncul desas-desus soal kesepakatan antara pembocor dan lembaga yang terkena serangan siber. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa komunikasi dengan pembocor, jika dibuka, akan makin menurunkan kredibilitas lembaga atau organisasi yang diserang.

Semua masih gelap. Desakan DPR diharapkan dapat memberi terang tentang pelaku, modus, dan korban sehingga membangun kewaspadaan baru di masyarakat serta lembaga lain. Kasus-kasus yang ada bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kita harus berasumsi bahwa serangan siber akan terus berlangsung dan makin canggih sehingga setiap kasus adalah pelajaran berharga bagi semua pihak.

Prinsip yang perlu dipegang ialah data merupakan minyak baru dalam ekonomi. Data sangat berharga, apalagi ketika pengembangan kecerdasan buatan makin marak. Data menjadi bahan baku dalam pengembangan kecerdasan buatan.

Di tengah negara-negara lain mulai mengatur pengembangan kecerdasan buatan, sebuah ironi ketika kita masih berkuat pada masalah kebocoran data. Situasi ini menandakan kita tertinggal dalam menangani masalah-masalah mendasar. Kita perlu menangani masalah ini segera sebelum kekayaan baru di abad digital itu mudah diambil oleh mereka yang tak berhak dan kasus kebocoran menjadi hal biasa.